

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Secara umum masalah utama yang sedang dihadapi secara nasional adalah sedikitnya peluang kerja, padahal peluang kerja yang besar dalam aneka jenis pekerjaan sangat dibutuhkan. Mengingat keadaan tenaga kerja sangat heterogen, baik dari segi umur, jenis kelamin, domisili, ketrampilan, dan pendidikan. Angkatan kerja terus meningkat jumlahnya, sedangkan kesempatan kerja sangatlah terbatas (Suratiah dalam Irwan, 2006)

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS, 2013) jumlah angkatan kerja di Indonesia pada Februari 2013 mencapai 121, 2 juta orang, bertambah sebanyak 3,1 juta orang dibanding angkatan kerja Agustus 2012 sebanyak 118,1 juta orang atau bertambah sebanyak 780 ribu orang dibanding Februari 2012. Jumlah penduduk yang bekerja di Indonesia pada Februari 2013 mencapai 114,0 juta orang, bertambah sebanyak 3,2 juta orang dibanding keadaan pada Agustus 2012 sebanyak 110,8 juta orang atau bertambah 1,2 juta orang dibanding keadaan Februari 2012. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Indonesia pada Februari 2013 mencapai 5,92 persen, mengalami penurunan dibanding TPT Agustus 2012 sebesar 6,14 persen dan TPT Februari 2012 sebesar 6,32 persen. Walaupun Badan Pusat Statistik (BPS) menyatakan adanya perbaikan dalam ketenagakerjaan Indonesia, dimana jumlah angkatan kerja dan jumlah penduduk yang bekerja mengalami peningkatan, sementara

tingkat pengangguran mengalami penurunan, tetapi angka pengangguran di Indonesia masih tinggi. Ini dikarenakan hanya ada sedikit penurunan angka pengangguran. Jelas keadaan ini berbanding lurus dengan angka kemiskinan yang ada.

Kemiskinan diartikan sebagai suatu keadaan dimana seseorang tidak sanggup memelihara dirinya sendiri sesuai dengan taraf kehidupan kelompok dan juga tidak mampu memanfaatkan tenaga mental, maupun fisiknya dalam kelompok tersebut (Soerjono, 2006). Pada dasarnya kemiskinan itu dapat dilukiskan sebagai kurangnya pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidup yang pokok. Oleh sebab itu, Soetomo (2008) menyatakan bahwa kondisi kemiskinan dengan berbagai dimensi dan implikasinya merupakan salah satu bentuk masalah sosial yang menggambarkan kondisi kesejahteraan yang rendah. Wajar apabila kemiskinan dapat menjadi inspirasi bagi tindakan perubahan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Adanya kebutuhan yang semakin kompleks dalam sebuah keluarga menuntut adanya usaha lebih untuk memperoleh penghasilan.

Kondisi pada masyarakat patriarkhi yang mengacu pada satu kondisi bahwa segala sesuatu diterima secara fundamental dan universal sebagai dominasi kaum laki-laki. Dalam budaya patriarkhi, maskulinitas berperan sebagai norma sentral sekaligus pertanda bagi tatanan simbolis masyarakat, yaitu memberikan kuasa lebih pada jenis kelamin laki-laki untuk mengakses *material basic of power* dari pada mereka yang berjenis kelamin perempuan (Munandar, 2010). Salah satu implikasi atas adanya keyakinan perihal ideologi

gender di masyarakat terutama dalam masyarakat patriarkhi adalah adanya pembagian kerja secara seksual antar manusia berbeda jenis kelamin, yakni laki-laki dan perempuan. Pembagian kerja merupakan salah satu perbedaan utama yang mendasar dalam kekuasaan antara laki-laki dan perempuan. Perempuan dalam sistem pembagian kerja secara seksual, cenderung selalu ditempatkan dalam wilayah domestik atau rumah tangga, dengan serangkaian kerja yang sifatnya reproduktif. Peranan domestik perempuan adalah peranan sosial yang terkait dengan aktivitas internal rumah tangga, seperti memasak, mengurus anak dan melayani suami. Hal ini mengakibatkan, para perempuan tidak mempunyai sumber uang. Pada sisi lain, laki-laki menempati posisi di wilayah publik yang sifatnya produktif. Peranan publik adalah peranan sosial, ekonomi, dan politik di luar rumah tangga. Mereka merupakan pihak pencari nafkah atau sebagai pemegang sektor produksi yang menghasilkan uang. Sesudah menikah, hampir seluruh kehidupan perempuan di dalam rumah tangga. Dalam keadaan seperti ini, perempuan menjadi tergantung kepada laki-laki secara ekonomi, karena pekerjaan di rumah tangga tidak menghasilkan gaji. Akhirnya bermuara pada ketimpangan gender pada kekuasaan yang terjadi dalam rumah tangga (Sunardi, 2008)

Salah satu tantangan yang dihadapi perempuan dalam proses modernisasi adalah ikut serta dalam sektor publik. Tantangan terberatnya adalah latar belakang sosial budaya yang menentukan kedudukan perempuan itu di dalam keluarga dan masyarakat yang dipengaruhi pula oleh pandangan tentang perempuan dalam budaya terutama pada masyarakat yang berbudaya

patriarkhi. Kemajuan zaman atau modernisasi telah memberikan dampak positif bagi tercapainya kesetaraan gender, peran perempuan dalam sektor publik semakin meningkat. Sama halnya dengan yang dikemukakan oleh Kusnadi (2006), bahwa perubahan sosial, ekonomi dan budaya yang dipicu oleh pembangunan diberbagai bidang telah mempengaruhi pandangan sebagian orang tentang perempuan. Atas dasar perubahan persepsi yang semakin baik terhadap perempuan, keterlibatan perempuan dalam kegiatan publik merupakan suatu kebutuhan untuk menjaga kelangsungan hidup rumah tangganya. Kaum perempuan tidak semata-mata bertanggung jawab terhadap urusan domestik ketika kebutuhan hidup semakin meningkat. Perempuan ikut serta dalam mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan keluarga.

Pada masa sekarang ini gender bisa dianggap sebagai sesuatu yang dinamis dan bisa disesuaikan dengan kondisi seseorang, maka tidak ada alasan lagi bagi kita untuk menganggap aneh seorang suami yang pekerjaan sehari-harinya memasak dan mengasuh anak-anaknya, sementara istrinya bekerja di luar rumah (Wiliam-de Vries, 2006). Desakan ekonomi keluarga menuntut perempuan untuk mampu mendapatkan penghasilan untuk mencukupi kebutuhan dengan ikut mencari nafkah. Semakin membaiknya pendidikan perempuan membuat mereka tergerak untuk memanfaatkan keahlian dan keterampilannya. Kebutuhan ekonomi yang semakin meningkat akan semakin terpenuhi apabila perempuan juga dapat memperoleh penghasilan. Kebutuhan inilah yang menuntut perempuan tidak hanya bekerja di sektor domestik melainkan harus mampu bekerja di sektor publik.

Terbatasnya lapangan kerja, tenaga kerja perempuan kalah bersaing dengan tenaga kerja laki-laki, sehingga mereka hanya dapat memasuki pekerjaan-pekerjaan yang rendah. Rendahnya posisi kerja perempuan juga karena kondisi pra kerja dan kondisi dalam kerja. Kondisi pra kerja meliputi pengalaman, pendidikan, dan ketrampilan yang rendah jika dibandingkan dengan laki-laki. Keterbatasan perempuan sebagai individu (*human capital*) dalam hal pendidikan, pengalaman, dan keterampilan kerja, kesempatan kerja, dan faktor ideologis menyebabkan perempuan memasuki lapangan pekerjaan yang berstatus dan berupah rendah. Keterkaitan perempuan dalam kegiatan rumah tangga menyebabkan ruang geraknya terbatas, sehingga mereka memilih pekerjaan-pekerjaan yang berada di dekat rumah yang biasanya berupah rendah dan sedikit persaingan dengan laki-laki. Keadaan ini merupakan gejala diskriminasi dan perempuan tersegmentasi pada sektor sekunder atau sektor informal yaitu yang berupah rendah, peluang yang ada terbatas, kesempatan promosi kecil, dan jaminan sosial tidak tersedia (Irwan, 2006)

Seperti adanya lowongan pekerjaan informal sebagai petugas SPBU bagi kaum perempuan. Pekerjaan yang dihadapkan pada banyaknya kendaraan dan asap kendaraan yang menyebabkan masyarakat beranggapan bahwa pekerjaan itu merupakan pekerjaan laki-laki. Bisingnya suara kendaraan bermotor maupun kotornya asap yang keluar dari mobil dan motor merupakan suasana yang harus dihadapi petugas SPBU. SPBU merupakan salah satu badan usaha yang sebagian besar berlangsung selama 24 jam. Jelas kondisi ini

juga dialami para perempuan pekerja untuk pulang malam hari. Perempuan pekerja SPBU dapat dikatakan bekerja pada sektor yang keras karena melayani orang dengan berbagai tipe dengan keadaan berdiri dan dalam waktu yang cukup lama. Apalagi bila dihadapkan dengan antrean kendaraan yang panjang. Jelas pekerjaan ini banyak menguras tenaga dan dibutuhkan stamina yang tinggi. Belum lagi adanya kerentanan terhadap pelecehan seksual baik dengan kata-kata maupun sentuhan fisik yang dapat dilakukan oleh pelanggan maupun rekan kerja.

Berdasarkan keadaan tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang bagaimana petugas SPBU perempuan mencitrakan dirinya, apa saja latar belakang mereka bekerja sebagai petugas SPBU, bagaimana hak dan kewajibannya, dan apa saja faktor pendukung dan penghambat yang mereka alami dalam melaksanakan pekerjaan sebagai petugas SPBU. Oleh sebab itu, peneliti melakukan penelitian dengan judul fenomena petugas SPBU perempuan di Kabupaten Sleman.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat diidentifikasi beberapa masalah, antara lain:

1. Sulitnya mencari pekerjaan karena besarnya jumlah angkatan kerja.
2. Kebutuhan hidup yang relatif tinggi pada masyarakat modern, menuntut perempuan ikut mencari nafkah.

3. Tuntutan terhadap pendidikan tinggi untuk lowongan pekerjaan di perkantoran (sektor formal).
4. Masih banyak perempuan yang berpendidikan relatif rendah sehingga sulit memasuki sektor formal.
5. Pekerjaan informal di SPBU bagi pekerja perempuan rentan terhadap pelecehan seksual.

C. Pembatasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka dalam penelitian ini lebih memfokuskan pada bagaimana petugas SPBU perempuan mencitrakan dirinya, apa saja latar belakang mereka bekerja sebagai petugas SPBU, bagaimana hak dan kewajibannya, dan apa saja faktor pendukung dan penghambat yang mereka alami dalam melaksanakan pekerjaan sebagai petugas SPBU.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan pembatasan masalah di atas, maka peneliti dapat merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pencitraan diri petugas SPBU perempuan terhadap pekerjaannya?
2. Apa latar belakang perempuan bekerja sebagai petugas SPBU?
3. Bagaimana kewajiban dan hak petugas SPBU perempuan dalam pekerjaannya?
4. Apa dampak peran sebagai petugas SPBU perempuan?

5. Apa saja faktor pendukung dan penghambat yang mereka alami dalam melaksanakan pekerjaan sebagai petugas SPBU?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian yang ingin dicapai oleh peneliti adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pencitraan diri petugas SPBU perempuan terhadap pekerjaannya.
2. Untuk mengetahui latar belakang perempuan bekerja sebagai petugas SPBU.
3. Untuk mengetahui kewajiban dan hak petugas SPBU perempuan dalam pekerjaannya.
4. Untuk mengetahui dampak peran sebagai petugas SPBU perempuan
5. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat yang mereka alami dalam melaksanakan pekerjaan sebagai petugas SPBU.

F. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membawa manfaat yang secara umum dapat diklasifikasikan dalam dua manfaat yaitu:

1. Manfaat teoritis

Sebagai hasil karya ilmiah, hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk menambah referensi atau informasi yang berkaitan dengan disiplin ilmu Sosiologi khususnya Sosiologi Gender.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi masyarakat luas

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi baru mengenai fenomena petugas SPBU perempuan.

b. Bagi mahasiswa

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan informasi dan menambah wawasan bagi para aktivis, cendekiawan, dan mereka yang menekuni serta berminat mengetahui tentang kajian gender.